

RENCANA KERJA 2026



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur atas segala Rahmat dan Hidayah yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa atas perkenaan kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2026 dengan baik. Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2026 ini berdasarkan usulan program dan kegiatan dari setiap bidang yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja (Renja) sebagai Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2026 serta untuk mereviu hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

Demikian atas tersusunya Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat dan pedoman yang dapat digunakan sebagaimana apa yang telah direncanakan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Tahun 2024.

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2024
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku
- C. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku
- D. Review Usulan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.

- A. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku
- B. Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Bab V. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk mencapai tujuan organisasi, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam setiap langkah/kegiatan operasi organisasi. Perencanaan mengarahkan organisasi bergerak sesuai dengan arah dan tujuan yang dikehendaki oleh organisasi. Selain dari pada itu perencanaan juga menjadi tolok ukur keberhasilan dari langkah-langkah atau kegiatan yang telah dilakukan. Oleh karena itu perencanaan harus disusun secara cermat dengan memperhatikan situasi kondisi yang berkembang saat ini dan situasi yang akan datang sehingga perencanaan tidak saja mampu menjawab permasalahan saat ini akan tetapi juga mampu menjawab permasalahan yang akan datang.

Dalam kehidupan organisasi bernegara, perencanaan menjadi salah satu kewajiban nasional yang harus dilaksanakan oleh setiap organisasi publik/pemerintahan pada semua level organisasi. Kewajiban tersebut tertera dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-undang tersebut ditegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM/D) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D) sebagai rencana kerja tahunan.

Pada tingkatan Perangkat Daerah implementasi kebijakan tersebut adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), yaitu Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku.

B. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah berakhir pada Tahun 2024;
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;

12. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2026, sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memberikan arah untuk mencapai tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan RPJMD Provinsi Maluku 2025-2029 dan RENSTRA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025-2029.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) adalah :

1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
2. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi.
3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.
4. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) Tahun dengan berpedoman pada Rencana Strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
5. Sebagai bahan evaluasi kegiatan Tahun sebelumnya.

D. Sistematika Penulisan.

Sistematika Penulisan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I. Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan

BAB II. Hasil Evaluasi RENJA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Tahun 2024.

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2024
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku
- C. Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku
- D. Review Usulan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

- A. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku
- B. Program dan Kegiatan

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Bab V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI TAHUN 2024

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2024

Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku pada Tahun 2024 sebesar Rp. 13.703.880.866,- dengan realisasi sampai akhir tahun sebesar Rp. 11.927.586.671,- (87.04 %). Sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 1.776.294.195,-. Alokasi dan realisasi anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sebagai berikut:

Tabel II. 1

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persen	Sisa Anggaran
Belanja Daerah	13.703.880.866	11.927.586.671	87,04	1.776.294.195
Belanja Langsung	8.354.769.712	7.748.550.124	92,74	606.219.588
Belanja Tidak Langsung	5.349.111.154	4.179.036.547	78,13	1.170.074.607

TABEL T-C.29

TABEL PENCAPAIAN TARGET RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Nilai SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika	BB	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan, dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	100%	100%	100%	75%	75%	100%	100%	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	16 Dokumen	11 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100	3 Dokumen	19 Dokumen	118
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan RKA SKPD	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	13 Dokumen	325
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	5 Dokumen	125

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	13 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100	7 Laporan	9 Laporan	45
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	75%	75%	100%	100%	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Bulan	45 Bulan	43 Bulan	43 Bulan	100	50orng/ Bulan	138 Bulan	306
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100	12 Dokumen	36 Dokumen	150

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	5 Laporan	125
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	20 Laporan	13 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	100	6 Laporan	26 Laporan	130
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	75%	75%	100%	100%	100%
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	5 Dokumen	125

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	5 Laporan	125
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	5 Laporan	125
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	40%	40%	100%	100%	100%
	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	5 Dokumen	125
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	5 Dokumen	125
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	5 Dokumen	125

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	75%	75%	100%	100%	100%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	5 Paket	125
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	9 Paket	3 Paket	3 Paket	100	3 Paket	15 Paket	125
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	3 Paket	1 Paket	1 Paket	100	1 Paket	5 Paket	125
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	12 Dokumen	16 Dokumen	400
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	60 Laporan	125

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	37 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	100	38 Laporan	91 Laporan	165
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	80 Unit	76 Unit	4 unit	4 unit	100	3 Unit	83 unit	103
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	50%	50%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	12 Laporan	16 Laporan	400

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	60 Laporan	125
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	36 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100	12 Laporan	60 Laporan	125
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	25%	25%	100%	100%	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	14 Unit	14 Unit	14 Unit	100	14 Unit	42 Unit	300
	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara					100	10 unit	3 unit	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 unit	1 unit	1 unit	100	1 unit	3 unit	300
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	16 Unit	16 Unit	16 unit	16 unit	100	16 unit	38 unit	237
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	100%	100%	100%	34%	34%	75%	75%	75%
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	100%	100%	100%	34%	34%	75%	75%	75%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Pengelolaan Relasi Media	Jumlah Aktivasi Relasi Media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Terverifikasi dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3, Aktif dalam kegiatan Relasi Media	12 Dokumen	9 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Laporan	11 Laporan	91
	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	500 Konten	504 Konten	12,60
	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Laporan dukungan Administratif, Keuangan, dan tata kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta di sampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Laporan	5 Laporan	125
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai Peraturan Perundangan	3 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	7 Permohonan	10 Permohonan	333

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan jaringan TIK	100%	88,8%	90%	30%	33%	20%	50%	50%
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra dan Akses Internet Pemerintah Daerah	74 unit	74 unit	74 unit	74 unit	100	74 unit	222 unit	300
	Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	100%	80%	100%	0 %	100%	66%	66%	66%
	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	4 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	5 Dokumen	125
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	100	1 Dokumen	5 Dokumen	125
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	100 %	125,9 %	85,2%	4%	100%	80%	80%	80%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019-2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2025 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di lingkup Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	80%	80%	80%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	4 Dokumen	2 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	100	1 Dokumen	5 Dokumen	125
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase aplikasi yang memenuhi standar keamanan informasi	23,25%	12,79%	23,25%	16%	69%	100%	100%	100%
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	100%	100%	100%	70%	70%	100%	100%	100%
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	46 PD	44 PD	44 PD	46 PD	100	40 PD	130 OPD	282

B. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah merupakan hasil pengamatan capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku mempunyai tugas Membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi Untuk melaksanakan tugas di atas Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
- b. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
- d. Pembinaan Teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
- e. Pembinaan Unit pelaksanan teknis dinas
- f. Pembinaan Kelompok jabatan fungsional;
- g. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya ; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku telah menetapkan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019-2024.

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Persandian dan urusan Statistik yang disajikan pada tabel berikut :

TABEL T-C.30

ANALISIS CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU

	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun (%)				Realisasi Capaian Tahun (%)				Catatan Analisis
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Nilai SAKIP Dinas Kominfo	-	-	B	BB	-	B	BB	BB	
2	Persentase Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	83,33	83,33	85	90	100	100	100	100	Perlu peningkatan dalam kualitas pelayanan dan prasarana penyebaran informasi
3	Persentase Data Statistik Sektoral Yang Tersedia	37	55,6	74,1	85,2	40,74	70,4	125,9	125,9	Perlu peningkatan prasarana untuk menunjang penyelenggaraan Statistik Sektoral
4	Persentase Aplikasi Yang Memenuhi Standar Keamanan Informasi	9,30	13,95	18,60	23,25	3,49	0	12,79	16,27	Terbatasnya SDM ASN berkualifikasi IT dan minimnya kesadaran pimpinan terhadap keamanan siber
4	Persentase Pemanfaatan Jaringan TIK	30	60	80	90	40,8	88,8	88,8	40	Perlu peningkatan dalam kualitas pelayanan dan prasarana Pemanfaatan Jaringan TIK

Dari tabel diatas terlihat bahwa sampai dengan tahun 2024, capaian beberapa Indikator Kinerja Kunci oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sudah melampaui target yang ditetapkan namun ada 1 Indikator yang belum dapat memenuhi target.

C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku terbentuk sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku. Berdasarkan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku melaksanakan program/kegiatan yang sesuai dengan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 dan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku namun dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, permasalahan dan hambatan tersebut adalah :

1. Struktur Organisasi belum optimal mengakomodir urusan Pemerintahan Bidang Statistik
2. Ketersediaan dan Pengembangan SDM belum menunjang Tupoksi
3. Kurangnya Infrastruktur TIK dan pendukungnya
4. Belum terintegrasinya pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di OPD lingkup Pemerintah Prov. Maluku.

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku tetap mempertimbangkan isu – isu penting sebagai bentuk kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat. Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan Tugas pokok dan Fungsi ditentukan oleh SDM dan sarana prasarana. Adapun Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sebagai berikut adalah :

1. Penerapan SPBE belum terintegrasi.
2. Pemanfaatan Jaringan TIK dan Komunikasi yang terintegrasi.
3. Keamanan Informasi.
4. Pengelolaan Data Statistik Sektoral
5. Keterbukaan Informasi Publik

6. Kelembagaan yang belum mengakomodir Norma, Standart, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Statistik
7. Ketersediaan dan Pengembangan SDM belum menunjang Tupoksi.

D. Review Usulan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Rancangan awal RKPD Provinsi Maluku dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada. Tetapi pagu anggaran yang didapat belum bisa mengakomodir program dan kegiatan maupun kebutuhan dana sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.

seperti yang tersaji pada tabel berikut ini :

TABEL T-C.31

**PERBANDINGAN ANTARA RANCANGAN AWAL RKPD DAN HASIL KEBUTUHAN RENSTRA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU**

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Prov Maluku	100%	11.758.247.072,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase Capaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Prov Maluku	100%	7.978.881.566
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov Maluku	92,61	665.531.988,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov Maluku	92,61	287.941.400
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov Maluku	5 Dokumen	565.531.988,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov Maluku	16 Dokumen	259.153.400
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Koordinasi Penyusunan RKA SKPD	Prov Maluku	1 Dokumen	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Koordinasi Penyusunan RKA SKPD	Prov Maluku	4 Dokumen	7.710.000
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Prov Maluku	1 Dokumen	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKP	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan	Prov Maluku	-	-

NO.	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Koordinasi Penyusunan DPA SKPD	Prov Maluku	1 Dokumen	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Koordinasi Penyusunan DPA SKPD	Prov Maluku	4 Dokumen	8.395.000
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD dan Koordinasi Penyusunan DPA_P SKPD	Prov Maluku	1 Dokumen	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD dan Koordinasi Penyusunan DPA_P SKPD	Prov Maluku	-	-
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov Maluku	7 Laporan	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Prov Maluku	20 Laporan	12.683.000
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prov Maluku	100 %	5.363.500.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prov Maluku	100 %	5.432.689.004
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prov Maluku	43 org/ Bulan	5.250.000.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Prov Maluku	45 orang/ Bulan	5.349.111.154
2.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov Maluku	1 Dokumen	73.500.000,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov Maluku	24 Dokumen	68.280.000

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov Maluku	1 Laporan	20.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Prov Maluku	4 Laporan	7.797.850
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Prov Maluku	4 Laporan	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Prov Maluku	20 Laporan	7.500.000
3.	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prov Maluku	100 %	90.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prov Maluku	100 %	15.748.350
1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Prov Maluku	1 Dokumen	20.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Prov Maluku	4 Dokumen	5.249.300
2.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov Maluku	1 Laporan	20.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov Maluku	4 Laporan	5.249.500
3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov Maluku	1 Laporan	50.000.000,00	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov Maluku	4 Laporan	5.249.550

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prov Maluku	100 %	552.893.435,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prov Maluku	100 %	16.509.300
1.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Pengadaan Pakian Olah Raga bagi Aparatur	Prov Maluku	1 Paket	37.000.000,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Terlaksananya Pengadaan Pakian Olah Raga bagi Aparatur	Prov Maluku	-	-
2.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya bagi Aparatur	Prov Maluku	1 Paket	48.750.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya bagi Aparatur	Prov Maluku	-	-
3.	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Prov Maluku	1 Dokumen	20.000.000,00	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Prov Maluku	4 Dokumen	5.650.500
4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Prov Maluku	1 Dokumen	20.000.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Prov Maluku	4 Dokumen	5.471.400
5.	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Prov Maluku	1 Dokumen	20.000.000,00	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Prov Maluku	4 Dokumen	5.387.400
6.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Prov lain, Luar Wilayah	15 orang	250.875.000,00	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat / Bimtek / Sosialisasi	Prov Maluku	-	-

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11
7.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah OPD yang mengikuti Sosialisasi	Prov Maluku	80-orang	73.604.969,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah OPD yang mengikuti Sosialisasi	Prov Maluku	-	-
8.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Bimbingan Teknis	Prov Maluku	80 orang	82.663.466,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Bimbingan Teknis	Prov Maluku	-	-
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prov Maluku	100%	1.003.257.934,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prov Maluku	100%	726.805.000
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Prov Maluku	1 Paket	48.169.622,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Prov Maluku	4 Paket	40.000.000
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Prov Maluku	3 Paket	162.152.204,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Prov Maluku	12 Paket	150.000.000
3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Prov Maluku	1 Paket	28.213.358,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Prov Maluku	4 Paket	25.000.000
4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Prov Maluku	1 Dokumen	8.394.750,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Prov Maluku	4 Dokumen	1.860.000

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	7	8	10	11
5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov Maluku	12 Laporan	250.000.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov Maluku	48 Laporan	39.982.000
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten/Kota dan Provinsi Lain, LUAR	16 Laporan	506.328.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten/Kota dan Provinsi Lain, LUAR	53 Laporan	469.963.000
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov Maluku	100%	1.470.600.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov Maluku	100%	37.180.000
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Prov Maluku	3 unit	500.850.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Prov Maluku	-	-
2.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Prov Maluku	1 Paket	436.000.000,00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Prov Maluku	-	-
3.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Prov Maluku	1 Unit	150.000.000,00	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Prov Maluku	-	-
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Prov Maluku	26 unit	263.750.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Prov Maluku	-	-
5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang tersedia	Prov Maluku	10 unit	120.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang tersedia	Prov Maluku	80 Unit	37.180.000

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	7	8	10	11
7.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov Maluku	100%	1.212.463.715,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan DaerahCakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov Maluku	100%	1.141.125.760
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat untuk menunjang aktivitas kantor	Prov Maluku	12 Laporan	2.754.155,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat untuk menunjang aktivitas kantor	Prov Maluku	4 Laporan	2.520.000
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prov Maluku	12 Laporan	192.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Prov Maluku	48 Laporan	234.000.000
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prov Maluku	12 Laporan	1.017.709.560,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Prov Maluku	48 Laporan	904.605.760
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov Maluku	100%	1.400.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov Maluku	100%	320.882.752

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Prov Maluku	10 unit	220.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Prov Maluku	14 unit	238.720.000
2.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Prov Maluku	10 unit	130.000.000,00	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Prov Maluku	-	-
3.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Prov Maluku	1 unit	1.000.000.000,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Prov Maluku	1 unit	58.652.752
4.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana Gedung Kantor yang dilaksanakan	Prov Maluku	10 unit	50.000.000,00	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin sarana dan prasarana Gedung Kantor yang dilaksanakan	Prov Maluku	16 unit	23.510.000
5.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Prov Maluku			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Prov Maluku	-	-
1.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Prov Maluku		15.754.665.655,65	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Prov Maluku	95,52%	2.820.000.000

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Prov Maluku		15.754.665.655,65	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	Prov Maluku	95,52%	2.820.000.000
1.	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Prov Maluku	1 Dokumen	63.000.000,00	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Prov Maluku	-	-
2.	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik dari Media Massa dan Media Sosial	Prov Maluku	1 Dokumen	57.749.929,00	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik dari Media Massa dan Media Sosial	Prov Maluku	-	-
3.	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Prov Maluku	1 Dokumen	80.000.000,00	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Prov Maluku	-	-
4.	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Prov Maluku	1 Dokumen	3.117.264.352,65	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Prov Maluku	10 Dokumen	710.000.000
5.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Pengelolaan Media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang terlaksana	Prov Maluku	1 Dokumen	188.999.874,00	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Pengelolaan Media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang terlaksana	Prov Maluku	-	-

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	7	8	10	11
6.	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Pelayanan informasi publik dalam rangka keterbukaan informasi publik	Prov Maluku	1 Dokumen	42.000.000,00	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Pelayanan informasi publik dalam rangka keterbukaan informasi publik	Prov Maluku	-	-
7.	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Prov Maluku	1 Layanan	500.000.000,00	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Prov Maluku	-	-
8.	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Prov Maluku	1 Dokumen	65.100.000,00	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Prov Maluku	4 Dokumen	1.000.000.000
9.	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Manajemen Komunikasi Krisis	Prov Maluku	1 Dokumen	50.000.000,00	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Dokumen Manajemen Komunikasi Krisis	Prov Maluku	-	-
10.	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM yang mengikuti bimtek/ pelatihan dalam bidang komunikasi dan informasi	Prov Maluku	75 orang	57.991.500,00	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah SDM yang mengikuti bimtek/ pelatihan dalam bidang komunikasi dan informasi	Prov Maluku	-	-
11.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Prov Maluku	1 Dokumen	1.000.000.000,00	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Prov Maluku	4 Dokumen	425.000.000
12.	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Program atau Kebijakan	Prov Maluku	1 Dokumen	3.000.000.000,00	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Program atau Kebijakan	Prov Maluku	3 Dokumen	685.000.000

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	7	8	10	11
13.	Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Prov Maluku	10 Unit	7.532.560.000,00	Penyediaan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Prov Maluku	-	-
3.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan jaringan TIK	Prov Maluku		23.574.075.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan jaringan TIK	Prov Maluku	85,62%	2.580.000.000
1.	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD yang telah menggunakan domain dan sub domain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemerintah	Prov Maluku		20.359.200.000,00	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah OPD yang telah menggunakan domain dan sub domain berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemerintah	Prov Maluku	100%	2.437.340.280
1.	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Prov Maluku	1 Domain	200.000.000,00	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi	Prov Maluku	-	-
2.	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Prov Maluku	1 Dokumen	200.000.000,00	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Prov Maluku	-	-
3.	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Prov Maluku	11 Unit	19.959.200.000,00	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Prov Maluku	74 Unit	2.437.340.280

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	7	8	10	11
1.	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Prov Maluku		3.214.875.000,00	Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Prov Maluku	97,77%	142.659.720
1.	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Prov Maluku	1 Dokumen	291.000.000,00	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi	Prov Maluku	-	-
2.	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Prov Maluku	1 Dokumen	291.000.000,00	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Prov Maluku	-	-
3.	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Prov Maluku	1 Unit	156.000.000,00	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola	Prov Maluku	-	-
4.	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Prov Maluku	1 Dokumen	350.000.000,00	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Prov Maluku	4 Dokumen	50.000.000
5.	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Prov Maluku	1 Dokumen	275.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Prov Maluku	-	--

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	7	8	10	11
6.	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Prov Maluku	44 OPD	275.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah Perangkat Daerah yang menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Prov Maluku	-	-
7.	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan yang Dikembangkan Berbasis Elektronik	Prov Maluku	1 Unit	275.625.000,00	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan yang Dikembangkan Berbasis Elektronik	Prov Maluku	-	-
8.	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	Prov Maluku	1 Layanan	275.625.000,00	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik Yang Terhubung Dengan Sistem Peghubung Layanan Pemerintah Daerah	Prov Maluku	-	-
9.	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Penyusunan Komite Provinsi Cerdas	Prov Maluku	1 Dokumen	275.625.000,00	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Bahan Administrasi Penunjang Pelaksanaan Kegiatan	Prov Maluku	-	-
10.	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Prov Maluku	1 Dokumen	200.000.000,00	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	Prov Maluku	-	-
11.	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Government Pengelolaan Chief Information Officer (GCIO)	Prov Maluku	1 Dokumen	300.000.000,00	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah Dokumen Government Pengelolaan Chief Information Officer (GCIO)	Prov Maluku	-	-

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Prov Maluku	1 Dokumen	250.000.000,00	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	Prov Maluku	4 Dokumen	92.659.720
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<i>Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia</i>	<i>Prov Maluku</i>		1.427.500.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	<i>Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia</i>	<i>Prov Maluku</i>	100%	150.000.000
1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Prov Maluku		1.427.500.000,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik Sektoral dalam Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Prov Maluku	100 %	150.000.000
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengolahan, Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Prov Maluku	1 Dokumen	700.000.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengolahan, Pengumpulan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Prov Maluku	4 Dokumen	129.682.000
2.	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Prov Maluku	100 Orang	150.000.000,00	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Prov Maluku	-	-

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	7	8	10	11
3.	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Prov Maluku	1 Dokumen	105.000.000,00	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen yang Dihimpun	Prov Maluku	1 Dokumen	4.980.000
4.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Prov Maluku	75 Orang	105.000.000,00	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	Prov Maluku	-	-
5.	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Prov Maluku	5 Unit	157.500.000,00	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Statistik	Prov Maluku	-	-
6.	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang dihimpun	Prov Maluku	1 Dokumen	210.000.000,00	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah data Statistik Sektoral yang dihimpun	Prov Maluku	1 Dokumen	15.338.000
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	<i>Persentase aplikasi yang memenuhi standar keamanan informasi</i>	<i>Prov Maluku</i>		754.419.500,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	<i>Persentase aplikasi yang memenuhi standar keamanan informasi</i>	<i>Prov Maluku</i>	97,54%	174.999.300
1.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Prov Maluku		605.419.500,00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Prov Maluku	100%	174.999.300
1.	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Prov Maluku	1 Dokumen	52.500.000,00	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah yang Ditetapkan	Prov Maluku	-	-

NO.	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET	PAGU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Daerah Provinsi Informasi Pemerintah	Prov Maluku	1 Laporan	78.750.000,00	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Daerah Provinsi Informasi Pemerintah	Prov Maluku	-	-
3.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Prov Maluku	1 Laporan	99.750.000,00	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Prov Maluku	-	-
4.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Prov Maluku	44 OPD	374.419.500,00	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	Prov Maluku	46 OPD	174.999.300
2.	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Prov Maluku		149.000.000,00	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Prov Maluku	-	-
1.	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring omunikasi Sandi	Prov Maluku	44 OPD	149.000.000,00	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	Prov Maluku	-	-

Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025 tidak dilaksanakan karena efisiensi anggaran sesuai Inpres No. 1 tahun 2025

E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan Hasil Musrembang Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku tidak mendapatkan usulan baik dari masyarakat maupun pokok pikiran (Pokir) DPRD.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sebagai salah satu Perangkat Daerah membantu Gubernur dalam mencapai visi dan misi Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan Urusan Persandian. Tujuan dan sasaran merupakan impact dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. Impact tersebut harus memberi ultimate goal dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Maluku Tahun 2025-2029 adalah :

“Mewujudkan Transformasi layanan publik berbasis digital didukung layanan statistik yang akurat dengan meningkatkan keamanan informasi”

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang Informatif;
2. Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
3. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral Daerah;
4. Meningkatnya Keamanan Informasi dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
5. Meningkatnya Tingkat Implementasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah;

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel III.1

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran 1 (Misi 1) : Tercapainya Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku Sasaran 3 (Misi 4) : Meningkatnya Infrastruktur Dasar Telekomunikasi	Mewujudkan transformasi layanan publik berbasis digital didukung layanan statistik yang akurat dengan meningkatkan keamanan informasi.		Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	48,6	51,5	54,3	57,2	60,0	62,9	Nilai
			Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	6,4	6,6	6,7	6,8	7,1	0	Indeks
			Indeks Pembangunan Statistik	2,35	2,40	2,45	2,50	2,55	2,60	Poin
			Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI)	229	259	304	349	389	400	Skor
		Meningkatnya Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang Informatif	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif (82,21)	Menuju Informatif (86,80)	Informatif (91,28)	Informatif (93,91)	Informatif (95,74)	Informatif (97,45)	Predikat
		Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,53	2,63	2,73	2,83	2,98	3,08	Indeks

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral daerah	Persentase Data Statistik Sektoral Daerah yang tersedia	62	64	66	68	70	72	Persen
		Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	25	28,28	33,19	38,4	42,47	43,67	Persen
		Meningkatnya Tingkat Implementasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	74,00 (BB)	76,00 (BB)	78,00 (BB)	79,00 (BB)	80,00 (A)	82,00 (A)	Skor

B. Program dan Kegiatan

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (outcome) dan keluaran (output) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program yang ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran haruslah didasari dan berpedoman kepada Kepmendagri 900.1.15.5-3406 tahun 2024 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050 - 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Ventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 Provinsi Maluku.

Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku mengusulkan 5 Program dan 12 Kegiatan dengan total anggaran APBD sebesar Rp. **11.098.993.531,00,-** dengan rincian anggaran tiap program adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebesar Rp. 8.286.511.551,00,-
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebesar Rp. 1.250.000.000,00
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar Rp. 1.190.183.000,00.
4. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar Rp. 229.498.980.
5. Program Penyelenggaran Statistik Sektoral sebesar Rp. 142.800.000.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH (RENJA)

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD

c. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
3. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
4. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
5. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

6. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
7. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

e. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5. Fasilitas Kunjungan Tamu
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Mebel
3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Aset Tetap Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4. Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi

1. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik
2. Diseminasi Informasi
3. Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
4. Pelayanan Informasi Publik
5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

a. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

1. Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

b. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi

1. Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
2. Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE
3. Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi
4. Penyediaan Akses Internet
5. Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi

1. Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia
2. Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional
3. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar
4. Peningkatan kualitas statistik sektoral
5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi

1. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
2. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah
3. Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan
4. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi

1. Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah

Berikutnya Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2026 dapat dilihat pada lampiran.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2026 adalah merupakan imlementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENSTRA).

Diharapkan RENJA ini dapat menjadi acuan pelaksanaan program/kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2026.

Ambon, November 2025

KERALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI MALUKU



Drs. Melkias M. Lohy, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19670511 198810 1 001

L A M P I R A N

RENCANA KERJA (RENJA)

**Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku
Tahun 2026**

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU
TAHUN 2026**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						11.098.993.531,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.098.993.531,00							0,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						10.726.694.551,00							0,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Pemenuhan Operasional Perangkat Daerah	-			100 %	8.286.511.551,00						-	0,00	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-			100 persen	138.663.500,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	45.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	6.298.100,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	7.313.400,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7 Laporan	10.052.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Berita Acara	70.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	-			100 persen	6.372.496.051,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/ Bulan	6.281.976.051,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	73.920.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	8.100.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD				6 Laporan	8.500.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-			100 persen	24.850.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	8.250.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8.250.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	8.350.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 persen	26.021.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	8.650.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	8.771.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	8.600.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				6 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 persen	359.343.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	ASN	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	ASN		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	50.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	ASN		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	ASN		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.800.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	ASN		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	25.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	ASN		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	251.543.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	ASN		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	148.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	70.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	78.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	892.500.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.500.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	190.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	700.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 persen	324.638.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				14 Unit	264.020.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	25.618.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				16 Unit	10.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	5.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi dan Komunikasi publik yang terkelola	-			75 %	1.250.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	-			75 persen	1.250.000.000,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Masyarakat	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik														
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan				75 Orang	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0018	Diseminasi Informasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Persentase khalayak yang terpapar informasi publik				85 Persentase	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik														
			Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika				1 Laporan	150.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0022	Pelayanan Informasi Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				7 Permohonan	100.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.1.01.0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				500 Media	1.000.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan	Masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	-	-			-	1.190.183.000,00						-	0,00	
	2.16.03.1.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	-	-			-	50.000.000,00			-	5. Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah				1 Dokumen	50.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Tersedianya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku	-			66 persen	1.140.183.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi														
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional				1 Layanan	50.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi														
			Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				14 perangkat daerah	215.183.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0032	Penyediaan Akses Internet														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas				14 Perangkat Daerah	800.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.1.02.0034	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				2 Dokumen	75.000.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						142.800.000,00							0,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	-			80 %	142.800.000,00						-	0,00	
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-			80 persen	142.800.000,00			-	5. Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				72,2 %	61.439.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0017	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik</i>				0 %	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	5. Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0018	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar														
			<i>Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral</i>				77.14 %	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral														
			<i>Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.</i>				72,2 %	81.361.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.1.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			<i>Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik</i>				0 Orang	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Organisasi Perangkat Daerah dan Masyarakat		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						229.498.980,00							0,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	<i>Persentase Penyelenggaraan keamanan informasi di Provinsi Maluku</i>	-			100 %	229.498.980,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Layanan Keamanan Informasi yang dikelola	-			100 Persen	229.498.980,00			-	5. Mengaks elerasi Pem angunan I nfrastruktur dan Pengel olaan Lingkungan Berkelanjut an	Organisasi Perangkat Daerah	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				0 Laporan	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Mengaks elerasi Pem angunan I nfrastruktur dan Pengel olaan Lingkungan Berkelanjut an	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				40 Perangkat Daerah	184.758.980,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	6. Mewujud kan Tata Kelola Pem erintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0007	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				3 Laporan	44.740.000,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	6. Mewujud kan Tata Kelola Pem erintahan yang Bersih, Akuntabel, dan Inovatif	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.1.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.				0 Dokumen	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan	Organisasi Perangkat Daerah		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21.02.1.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	-	-			-	0,00			-	5. Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2.21.02.1.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah															
			Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.				0 Kegiatan	0,00	Kota Ambon, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	5. Mengakselerasi Pembangunan Infrastruktur dan Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	JUMLAH							11.098.993.531,00							0,00		